



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Indonesia

***Correspondence:**

setyawansetu@gmail.com

DOI: [10.22219/jaa.v3i1.11544](https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11544)

Sitasi:

Setyawan, S. (2020). Analisis Kemampuan Fiskal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur Dalam Transparansi Di Website. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 3(1), 60-68.

Proses Artikel

Diajukan:

17 Maret 2020

Direviu:

6 April 2020

Direvisi:

25 April 2020

Diterima:

25 April 2020

Diterbitkan:

27 April 2020

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang Gedung Kuliah Bersama 2 Lantai 3. Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

P-ISSN: 2715-1964

E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

ANALISIS KEMAMPUAN FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR DALAM TRANSPARANSI DI WEBSITE

Setu Setyawan^{1*}

ABSTRACT

This research aims to analyze the relationship between the fiscal capacity of district and city governments in East Java Province with uploading on the website. This research is important because the Government needs to provide public information that can be accessed by the public and stakeholders, and the existence of transparency that provides a positive image for the government. The population in this study were all district / city local governments in East Java. Based on the criteria determined in the sample selection using purposive sampling techniques. Research results show that the amount of wealth owned by local governments does not encourage local governments to disclose financial statements on local government websites. While local governments with high levels of leverage tend to cover their financial statements. This can be due to the higher leverage, the lower the funding obtained from creditors. The high level of leverage that is owned by local governments makes creditors will rethink in lending funds, because it takes into account the ability to pay long-term obligations. In addition, the use of high debt as a source of regional financing can signal a negative performance of local governments.

KEYWORDS: Financial Statements; Fiscal Capacity; Local Governments; Regional Fiscal Ability; Website.

ABSTRAK

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hubungan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten dan kota di provinsi jawa timur dengan pengunggahan di website. Penelitian ini penting karena Pemerintah perlu menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan, dan adanya transparansi yang memberikan citra positif bagi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan besarnya kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan di website pemerintah daerah. Sementara pemerintah daerah dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung menutupi laporan keuangannya. Hal ini dapat dikarenakan semakin tinggi leverage, maka semakin rendah pendanaan yang didapatkan dari kreditur. Besarnya tingkat leverage yang dimiliki pemerintah daerah membuat kreditur akan berpikir ulang dalam meminjamkan dana, karena memperhitungkan kemampuan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Selain itu penggunaan hutang yang tinggi sebagai sumber pembiayaan daerah dapat memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang negatif.

KATA KUNCI: Kapasitas Pajak; Kemampuan Fiskal Daerah; Laporan Keuangan; Pemerintah Daerah; Website



©2020 Setu Setyawan

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

61

Kasus korupsi yang terjadi beberapa tahun ini membuat rakyat ragu apakah pemerintah dapat dipercaya dalam mengelola negara, sehingga kinerja pemerintah saat ini selalu menjadi sorotan publik. Dengan demikian, demi mengembalikan kepercayaan rakyat maka pemerintah menerapkan *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu prinsip dalam terciptanya pemerintahan yang baik.

Pemerintah perlu menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi maka akan memberikan citra yang positif bagi pemerintah. Pengungkapan laporan keuangan di *internet* merupakan salah satu dari bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah kepada masyarakat. Penyampaian informasi terutama informasi mengenai keuangan sendiri akan mencegah terjadinya penyelewengan dalam pemanfaatan anggaran. Kewajiban pemerintah dalam melakukan transparansi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya dan setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana.

Pemanfaatan media *internet* sebagai alat komunikasi dan berbagi informasi antara pemerintah dan masyarakat ataupun oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat akan lebih murah dan menghemat anggaran. Namun sayangnya pemanfaatan media *internet* ini masih belum digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Salah satu media yang memanfaatkan fasilitas *internet* yaitu *website*. *Website* adalah kumpulan halaman web yang menampilkan informasi berupa dokumen atau data berupa teks, gambar, animasi, video maupun gabungan semuanya yang umumnya diakses melalui internet. Banyak *website* pemerintah daerah yang hanya berisi informasi kegiatan sosial namun tidak ada pengungkapan informasi keuangannya. [Muhammad \(2012\)](#) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non keuangan.

Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang cukup luas di Indonesia, dimana daerahnya terdiri dari 1 provinsi 29 kabupaten dan 9 kota. Sedangkan data dari BPS dan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur (Januari – Juni 2015) mencapai 5,22% dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Banten di pulau Jawa dan lebih tinggi 0,52 poin dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional (4,70%). Namun berdasarkan data yang diungkapkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), berdasar lokasi terjadinya praktik korupsi di Indonesia, Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan penemuan kasus korupsi terbanyak, dengan tidak hanya berpusat di provinsi namun juga terdapat di pemerintah kota dan kabupaten. Berdasarkan data yang diperoleh, sedikitnya 54 kasus dengan kerugian Rp. 332,3 miliar dan ada 64 kasus korupsi di Jawa Timur sepanjang tahun 2016 dengan merugikan negara sebanyak Rp 325 miliar. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya agar meminimalisir terjadinya penyelewengan.

JAA
3.1

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah, telah banyak dilakukan seperti oleh [Laswad et.al., \(2005\)](#), [Styles dan Tennyson \(2007\)](#), [Garcia dan Garcia \(2010\)](#), [Setyaningrum dan Syafitri \(2012\)](#), [Afyansyah dan Haryanto \(2013\)](#), [Hudoyo](#)

[dan Mahmud \(2014\)](#), dengan beberapa kombinasi variabel independen yang berbeda. Namun dari beberapa penelitian masih menunjukkan hasil yang bertentangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut mengenai pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah dengan kekayaan daerah, pendapatan per kapita, dan leverage sebagai variabel independen dimana pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai objek yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menguji apakah kekayaan daerah, pendapatan per kapita, dan *leverage* mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berbasis *web*. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kekayaan daerah, pendapatan per kapita, dan *leverage* terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berbasis *web*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kekayaan Daerah

Besarnya kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, akan cenderung lebih rentan dalam terjadinya penyalahgunaan. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk lebih mengawasi kinerja pemerintah daerah. Menurut [Afransyah dan Haryanto \(2013\)](#), besarnya kekayaan daerah akan berbanding lurus dengan kepedulian masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah.

[Laswad et.al., \(2005\)](#), [Setyaningrum dan Syafitri \(2012\)](#), menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan di *internet* oleh pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan [Afransyah dan Haryanto \(2013\)](#), [Hudoyo dan Mahmud \(2014\)](#), diperoleh hasil bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adanya perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian menggunakan variabel kekayaan daerah untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berbasis web.

Pendapatan per Kapita

Menurut [Hudoyo dan Mahmud \(2014\)](#), pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator perekonomian suatu pemerintahan baik itu dalam skala nasional ataupun daerah. Pendapatan per kapita dapat menjadi indikator daya beli ekonomi masyarakat terhadap ragam kebutuhan yang mereka butuhkan, salah satunya yaitu kebutuhan informasi lewat media *internet*. *Internet* akan menjadi kebutuhan yang penting karena standar kehidupan yang meningkat di masyarakat, sehingga pelaporan keuangan di *website* oleh pemerintah dapat menjadi tuntutan dari masyarakat setempat.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh [Styles dan Tennyson \(2007\)](#), dan [Hudoyo dan Mahmud \(2014\)](#), pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut.

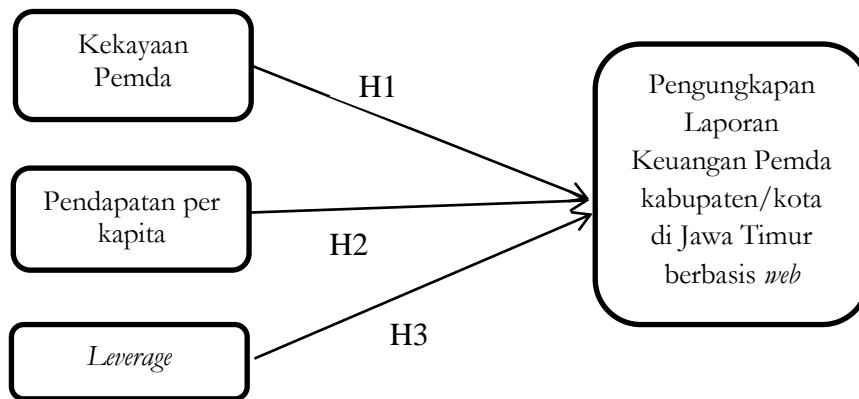
H₂: Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berbasis web.

Leverage

Menurut [Hudoyo dan Mahmud \(2014\)](#), pemerintah daerah yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi menutupi laporan keuangan yang dimilikinya, atau dengan kata lain mereka tidak menyampaikan laporan keuangan secara terbuka contohnya melalui *website* resmi pemerintah daerah. Sedangkan *leverage* dalam penelitian [Laswad et.al., \(2005\)](#) dan [Garcia \(2010\)](#) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan, namun [Hudoyo dan Mahmud \(2014\)](#) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berbasis web.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.
Kerangka
Pemikiran

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan fokus pada tahun 2017. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka terdapat 36 pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian. Variabel bebas (*Independent variabel*) dalam penelitian ini kekayaan daerah (x_1), pendapatan per kapita (x_2), dan *leverage* (x_3). Variabel Terikat (*Dependent variable*) adalah pelaporan keuangan berbasis *web* oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur (y). Pengukuran variabel ini menggunakan variabel *dummy* yang penilaiannya didasari oleh Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Dimana dalam Intruksi Mendagri tersebut mengamatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan menu *content* dengan nama TPAD dalam *website* resmi pemerintah yang didalamnya terdiri dari 12 items. Jika terdapat pengungkapan dari salah satu item yang terdapat di Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012, maka akan diberi nilai 1 sedangkan jika tidak 0. Model regresi linear yang digunakan adalah:

$$\text{IFR Leverage} = \beta_0 + \beta_1 \text{Kekayaan daerah} + \beta_2 \text{Pendapatan per kapita} + \beta_3$$

Dimana:

IFR	= Indeks scoring terhadap website pemerintah daerah
B_0	= Konstanta
Kekayaan daerah	= Total aset suatu pemerintah daerah
Pendapatan per kapita	= Pendapatan rata-rata yang dimiliki suatu masyarakat daerah
Leverage	= Hutang yang dimiliki suatu pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguji Kelayakan Model Regresi.

Tabel 1.
Hosmer and
Lemeshow
Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	18.269	7	.011

Berdasarkan hasil pada Tabel 1 di atas, pengujian menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 18.269 dengan signifikansi (p) sebesar 0,11. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.

Menilai Keseluruhan Model (*overall model fit*).

Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model (*overall model fit*). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara $-2 \text{ Log Likelihood}$ ($-2LL$) pada awal (*Block Number* = 0) dengan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ ($-2LL$) pada akhir (*Block Number* = 1). Adanya pengurangan nilai antara $-2LL$ awal (*initial -2LL function*) dengan nilai $-2LL$ pada langkah berikutnya ($-2LL$ akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013).

Tabel berikut menunjukkan hasil perbandingan antara $-2LL$ awal dengan $-2LL$ akhir.

Tabel 2.
Perbandingan
Nilai $-2LL$
Awal dengan
Nilai $-2LL$
Akhir

	$-2LL$	Nilai
1. Awal (blok 0)		48,114
2. Akhir (blok 1)		44,959

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 2 di atas, nilai $-2LL$ awal adalah sebesar 48,114. Setelah dimasukkan keenam variabel independen maka nilai $-2LL$ akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 44,959. Penurunan *likelihood* ($-2LL$) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Adapun hasil probabilitas masing-masing responden dan distribusi hasil peluang untuk menunjukkan kecenderungan variabel sebagai berikut

Classification Table^a

Observed			Predicted		
			Pengungkapan Laporan Keuangan		Percentage Correct
			Tidak ada	Ada	
Step 1	Pengungkapan Laporan Keuangan	Tidak ada	20	2	90.9
		Ada	11	3	21.4
Overall Percentage					63.9

Tabel 3. Classification Table

a. The cut value is .500

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa dari 36 sampel, terdapat 22 daerah yang tidak ada laporan keuangan dan setelah diprediksi dengan analisis regresi logistik terdapat 3 daerah yang berpindah menjadi ada laporan keuangan dengan kata lain sebesar 90,9% dari 22 daerah yang tidak laporan keuangan. Kemudian dari 14 daerah yang ada laporan keuangan setelah diprediksi terdapat 3 daerah yang berubah tidak ada atau sebesar 21,4% dari 14 daerah yang ada laporan keuangan daerah di *website*. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka secara umum model yang diperoleh dapat diandalkan dalam memprediksi para responden sebesar 63,9%.

Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	44.959	.084	.114

Tabel 4. Nagelkerke R Square

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan hasil Tabel 4 uji regresi logistik (lihat lampiran) diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,114 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 11,4%, sedangkan sisanya sebesar 88,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Variabel bebas memberikan pengaruh sebesar 11,4% terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (*Omnibus Test*)

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	3.155	3	.368
	Block	3.155	3	.368
	Model	3.155	3	.368

Tabel 5. Hasil Omnibus Test

Sumber: Data primer diolah

Pada tabel 5 tersebut diperoleh nilai peluang chi square $0,368 > \alpha = 0,05$ perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel Kekayaan Daerah, Pendapatan Perkapita, dan *Leverage* berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Uji Parsial (*Wald Test*)

Menguji koefisien regresi untuk menguji signifikansi setiap variabel. Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel berikut ini.

Variabel bebas	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
X1	0.331	0.436	0.575	1	0.448	2.461
X2	111.135	280.352	0.157	1	0.692	1.557
X3	106.228	124.622	0.727	1	0.394	2.460
Constant	-1.807	0.977	3.420	1	0.064	0.000

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, hasil pengujian menghasilkan model regresi sebagai berikut:
 $Y = -1,807 + 0,331 X1 + 111,135 X2 + 106,228 X3$

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berbasis *Web*

Dari hasil pengujian pengaruh kekayaan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* menunjukkan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar $0,448 > 0,05$. Hal ini membuat hipotesis yang digunakan tidak sesuai dengan hasil penelitian.

Besarnya kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu adanya aset yang tidak terkelola dengan baik. Tidak terkelolanya aset dengan baik dapat menyulitkan pemerintah dalam pencatatan informasi terkait kepemilikan aset yang dimiliki dalam pelaporan neraca. Hal tersebut akhirnya membuat pemerintah enggan dalam mengungkapkan laporan keuangannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Hudoyo dan Mahmud \(2013\)](#); [Afransyah dan Haryanto \(2013\)](#) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh [Laswad et.al., \(2005\)](#); [Setyaningrum dan Syafitri \(2012\)](#) dimana kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Pengaruh Pendapatan per Kapita Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berbasis *Web*

Hasil penelitian mengenai pengaruh pendapatan per kapita terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah menunjukkan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website*. Hasil pengujian tidak mendukung hipotesis kedua dalam penelitian ini, yang ditunjukkan dengan nilai signifikan $0,692 > 0,05$. Hal ini membuat hipotesis yang digunakan tidak sesuai dengan hasil penelitian.

Besarnya pendapatan perkapita yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur belum mendorong pemerintah dalam pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini juga dapat disebabkan masih rendahnya keingintahuan masyarakat atas kinerja pemerintah. Tingginya pendapatan per kapita tidak secara langsung memberikan dampak bahwa masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang dikeluarkan pemerintah daerah pada situs *website* pemerintah. Meskipun tingkat pendapatan per kapita tinggi mempengaruhi

kemampuan penggunaan *internet* yang semakin besar, namun masyarakat saat ini lebih banyak menggunakan *internet* untuk mencari kebutuhan pribadi dan hiburan. Selain itu banyaknya masyarakat yang tidak mengerti mengenai isi laporan keuangan juga menjadi penyebab masyarakat cenderung cuek dalam pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Masyarakat akan meminta informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah ketika mereka membutuhkan saja. Sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan menganggap bahwa pengungkapan laporan keuangan di *website* oleh pemerintah daerah tidak perlu dilakukan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [Styles dan Tennyson \(2007\)](#), [Hudoyo dan Mahmud \(2013\)](#) yang menemukan adanya pengaruh signifikan pendapatan per kapita terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berbasis *Web*

Hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikans sebesar $0,394 > 0,05$. Hal ini membuat hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diterima.

Pemerintah daerah dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menutupi laporan keuangannya. Hal ini dapat dikarenakan semakin tinggi *leverage*, semakin rendah pendanaan yang di dapatkan dari kreditur. Besarnya tingkat *leverage* yang dimiliki pemerintah daerah membuat kreditur akan berpikir ulang dalam meminjamkan dana, karena memperhitungkan kemampuan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Selain itu penggunaan hutang yang tinggi sebagai sumber pembiayaan daerah dapat memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang negatif. Untuk itu pemerintah daerah dengan tingkat *leverage* yang cukup tinggi cenderung mengambil tindakan untuk tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [Sinaga \(2011\)](#); [Hudoyo dan Mahmud \(2014\)](#) dimana *leverage* tidak mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan [Laswad et.al., \(2005\)](#) dimana dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, pendapatan per kapita, dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan karena Intruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ/2012 yang masih terbilang baru, sehingga banyak pemerintah di daerah kabupaten maupun kota yang belum siap sepenuhnya untuk mengimplementasikan intruksi yang dikeluarkan oleh Mendagri.

- Garcia, A. C., dan J. G. Garcia. 2010. "Determinant of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities". *Local Government Studies*, Vol. 36, No. 5, 679–695, October 2010.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Edisi 7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hudoyo, Y. T., dan A. Mahmud. 2014. "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Laswad, F., R. Fisher, dan P. Oyelere. 2005. "Determinants of voluntary Internet Financial Reporting by local government authorities". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 24, 101-121, 2005.
- Muhammad, B. H. 2012. "Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia". *Skripsi Sarjana FPEB UPI*.
- Setyaningrum, D., dan F. Syafitri. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.9, No.2, hal 154-170.
- Sinaga, Y. F. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan laporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah". *Skripsi*. FEB UNDIP. Semarang.
- Styles, A. K., dan M. Tennyson. 2007. "The accessibility of financial Reporting U,S Municipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting". *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 19 (1), hal 56-92.